

**Evaluasi Program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan**

Khusnul Khotima (Khusnul)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

JURUSAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI

CIREBON

KhusnulKhotimah1106@gmail.com

Abstract

Khusnul Khotima, 14123541344. Evaluation Institution Program Model Village Conservation (LMDK) And Implications In Community Welfare, in the village Linggasana in Cilimus district brass, Skripsi, Cirebon: Of Community Development (PMI Islamic) Faculty Ushuluddin Culture Proselytizing IAIN Syekh Nurjati Cirebon. The Village Model Conservation (LMDK) is one Kemenhut policy aimed at villagers it is or society be around conservation area. LMDK occurs when the transition the region the area Ciremai be a national park on 19 October 2004. One village supporting get programs LMDK is a Village Linggasana in Cilimus district brass.

Methods used in this research is deskriptif-kualitatif. Technique withdrawal informants by using purposive and using three technique data collection, namely observation, interview and documentation. Analysis in this research uses the data analysis in the field model miles and huberman, by do reduction data, presentation of data and verification or withdrawal conclusion. After data collected, so the next step is to triangulate it or merger. The result of this research indicates that program LMDK that existed in the Village Linggasana are. This is because several factors, whether it is a factor of the community and from the his government itself. But basically, not functioning LMDK the program was misstated the government in designing programs empowerment for the village buffer, and the LMDK that existed in the village linggasana does not fully answers the needs of the people Linggasana itself.

Keywords: evaluation, implementation, implications, welfare, LMDK program

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Linggasana adalah salah satu desa berada di Kawasan Desa Hutan Gunung Ciremai dan di sekitar Kawasan Obyek Wisata Linggarjati Indah. Sebagian besar matapencaharian masyarakatnya adalah sebagai buruh tani. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Linggasana tidak memiliki lahan pertanian untuk dikelola sendiri. Mayoritas dari mereka hanya bekerja di lahan pertanian masyarakat lainnya yang memiliki lahan pertanian. Selain itu, masyarakat Linggasana juga bekerja sebagai penggarap lahan hutan. Namun, mereka hanya bisa menggarap lahan hutan sebelum terjadinya perubahan fungsi wilayah hutan yang di keluarkan oleh Kementerian Kehutanan melalui SK Menhut RI No. 424/Menhut-II/2004 dan bertanggal 19 Oktober 2004, yang mengubah status Hutan Lindung di Gunung Ciremai menjadi Kawasan

Taman Nasional yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) sejak akhir 2006.¹

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Balai TNGC tidak hanya melakukan fungsi perlindungan dan pengamanan kawasan. Namun juga memperhatikan aspek lainnya, yaitu masyarakat di sekitar kawasan TNGC. Kawasan TNGC dikelilingi 45 desa yang terdiri dari 27 desa di Kabupaten Kuningan dan 18 desa di Kabupaten Majalengka. Dari 45 desa tersebut, 37 desa di antaranya merupakan desa yang memiliki akses di kawasan hutan Gunung Ciremai sebelum statusnya menjadi Taman Nasional. Bergantinya status maka berganti pula pengelolaannya, begitupun akses masyarakat yang tidak boleh melakukan

¹id.wikipedia.org/wiki/taman_nasional_gunung_ciremai. Diakses pada Selasa, 28 April 2015.

pemanfaatan berbasis lahan di dalam kawasan. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Balai TNGC mengembangkan program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) yang telah lama diusung oleh Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan dalam rangka mengembangkan potensi yang dimiliki desa untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan pembangunan desa sehingga ketergantungan terhadap alam hutan dapat diminimalisasi. Tujuan pembangunan LMDK yaitu agar pengelolaan Kawasan Konservasi dapat dilakukan dengan baik sehingga berfungsi secara optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.² Berdasarkan rencana TNGC, sampai dengan tahun 2015, TNGC akan membentuk 24 MDK di desa-desa sekitar kawasan yang diharapkan 5 tahun mendatang desa-desa yang sebelumnya memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan dapat melakukan usaha lain yang bersifat mandiri sehingga secara bertahap perekonomian dapat meningkat. Desa Linggasana adalah salah satu desa yang mendapatkan program LMDK tersebut.

Terpilihnya Desa Linggasana sebagai salah satu desa yang mendapatkan program LMDK karena Linggasana merupakan salah satu desa yang masyarakatnya memanfaatkan lahan hutan untuk pertanian, sehingga Desa Linggasana menjadi salah satu desa yang mendapat program Model Desa Konservasi (MDK) dari Kementerian Kehutanan. Kegiatan ini berawal dari pelatihan yang dicanangkan oleh pihak TNGC bekerjasama dengan pemerintah desa pada tahun 2011. Kegiatan dilakukan selama sepekan di Balai desa dan diikuti oleh ± 30 orang peserta yang merupakan masyarakat eks penggarap lahan hutan.³ Dalam kegiatan tersebut, pemerintah mencanangkan 3 pelatihan kepada warga, yakni Lingkungan Hidup, Perhutanan, dan Home Industri.

A. Rumusan Masalah

Berawal dari uraian yang dipaparkan pada latar belakang di atas, bagian yang menjadi titik fokus dalam rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana implikasi program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) terhadap

kesejahteraan masyarakat Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
2. Mendeskripsikan implikasi program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kekayaan wacana mengenai program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) dan memberikan sumbangan pemikiran kepada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) maupun praktisi Kementerian Kehutanan dalam program kebijakan masyarakat Desa Konservasi.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) serta memberikan sumbangan data bagi para peneliti selanjutnya sehingga tercapainya tujuan dalam program kebijakan Model Desa Konservasi (MDK).

D. Signifikansi

Persoalan perekonomian merupakan salah satu persoalan yang menjadi tumpuan sebagian permasalahan masyarakat, baik masyarakat nelayan, urban maupun agraris sebagai ukuran tingkat kesejahteraan. Maka fokus kajian studi tentang evaluasi program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) di Desa Linggasana ini menjadi sangat relevan dan signifikan untuk dilakukan. Tidak hanya menganalisis tentang implementasi program LMDK tersebut, namun yang lebih penting adalah bagaimana implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Linggasana yang dapat direpresentasikan dari taraf hidup masyarakatnya, baik yang aktif dalam kegiatan program LMDK tersebut maupun yang tidak terlibat di dalamnya.

KAJIAN PUSTAKA

Pertama, Jurnal Ristianasari, dengan judul “Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi Terhadap Kemandirian Masyarakat:

² www.academia.edu/10852570/MODEL_DESA_KONSERVASI

I. Diakses pada Selasa, 28 April 2015.

³ Wawancara dengan Ibu Kusmiati, ketua home industri Desa Linggasana, 18 April 2015.

Kasus Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung.” Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kegiatan pemberdayaan masyarakat MDK di TNBBS, dan (2) menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan efektifitas pemberdayaan masyarakat MDK di TNBBS. Desain penelitian menggunakan metode *survey*. Analisis pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan *inferensial*. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa karakteristik sosio-demografi, interaksi serta akses terhadap sumber daya dan pendekatan pemberdayaan mempunyai korelasi sangat signifikan dengan kemandirian masyarakat.⁴ Letak perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan saudara Ristianasari, memang mengkaji tentang dampak program MDK terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam penelitian tersebut menggunakan kemandirian masyarakat sebagai hubungan antara. Sedangkan penelitian ini akan mengevaluasi program LMDK dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Konservasi, dengan menggunakan taraf kehidupan masyarakat yang menjadi hubungan antara kesejahteraan. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan metode statistik deskriptif dan *inferensial*, sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif.

Kedua, Jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Eko Wahyu Budi Yanto, dengan judul, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Konservasi Hutan*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam usaha konservasi hutan, menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam usaha konservasi hutan, dan menganalisis sejauh mana pengaruh konservasi hutan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model kasus tunggal. Fokus penelitiannya adalah konservasi hutan di sekitar Desa Nglebut, Randublatung, Blora. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Data penelitian dianalisis dengan model analisis interaktif. Penelitian ini menghasilkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi hutan sangat ditentukan oleh mata pencaharian mereka. Para pengrajin kursi dari tonggak jati maupun para pencari tonggak jati memiliki tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Sedangkan masyarakat petani dan pedagang relatif rendah peran sertanya dalam usaha konservasi

hutan.⁵ Letak perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian tersebut adalah bahwa penelitian saudara Eko Wahyu Budi Yanto belum mengkaji tentang dampak adanya usaha konservasi hutan terhadap masyarakat. Sedangkan penelitian ini akan melakukan evaluasi terhadap program LMDK dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat desa yang dapat direpresentasikan dari taraf hidup masyarakatnya.

Ketiga, nama tidak ditemukan. Judul Jurnal, “*Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Model Desa Konservasi Di Desa Tamanjaya*”. Model Desa Konservasi (MDK) merupakan salah satu kebijakan prioritas Departemen Kehutanan berupa program pembangunan desa model di sekitar Kawasan Konservasi. *Output* utama dari program tersebut adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sekaligus mengurangi tekanan terhadap Kawasan Konservasi. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Balai Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kehutanan mulai mengembangkan Model Desa Konservasi (MDK) di Desa Tamanjaya. Desa Tamanjaya merupakan salah satu desa di daerah penyangga yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu, karena keragaman Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya yang telah memberi ruang kepada masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian. Kegiatan Model Desa Konservasi di Tamanjaya dilakukan sejak tahun 2009 dan diperkuat kembali pada tahun 2011. Kegiatan tersebut diawali dengan inventarisasi dan identifikasi potensi desa dan dilanjutkan dengan pemberian bantuan berupa pelatihan serta pembuatan demplot padi organik. Ditetapkannya Desa Tamanjaya sebagai Model Desa Konservasi diharapkan desa tersebut dapat menjadi contoh atau model bagi desa lain di sekitarnya dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang menyangkut pemberdayaan masyarakat dalam aspek konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya.⁶ Letak perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian tersebut adalah bahwa penelitian tersebut hanya mengkaji tentang peran program MDK, tidak mengkaji dampaknya terhadap masyarakat yang ada di sekitar hutan konservasi secara keseluruhan. Sedangkan penelitian ini selain akan melakukan evaluasi terhadap program LMDK namun juga ingin

⁴Ristianasari, Pudji Muljono dan Darwis S. Gani, *Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi Terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung*, jurnal yang disetujui 31 Mei 2013. Bogor: Pusat Penyuluhan Kehutanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan, 2013. <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/175>. Diakses pada 15 november 2015.

⁵Jurnal Budi Yanto Eko Wahyu, *Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Konservasi Hutan: Kasus Konservasi Hutan Di Sekitar Desa Nglebut, Randublatung, Blora*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>. Diakses pada 15 November 2015.

⁶Jurnal, nama tidak ditemukan, *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Model Desa Konservasi Di Desa Tamanjaya: Kasus di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, desa Tamanjaya*. [www.ujungkulon.org>Home>Berita](http://www.ujungkulon.org/Home/Berita). Diakses pada 15 November 2015.

mengetahui implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Konservasi.

1. Teori Kesejahteraan

a. Konsep Kesejahteraan

Penelitian tentang Evaluasi Program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) ini mengacu pada konsep kesejahteraan yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Alasannya, karena indikator-indikator yang terdapat dalam konsep kesejahteraan tersebut merupakan indikator yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sosial masyarakat, baik itu masyarakat urban, agraris maupun nelayan. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Prof. Adi Fahrudin (2014:9), yang mana, ia mengatakan bahwa kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. Dengan demikian, konsep kesejahteraan yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ini merupakan salah satu konsep yang sesuai untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dalam suatu masyarakat.

b. Indikator Kesejahteraan

Taraf hidup atau tingkat kesejahteraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik secara fisik maupun sosial. Dalam hal ini, penelitian ini mengacu pada teori Abraham Maslow. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut mempunyai tingkatan atau hirarki, mulai dari yang paling rendah (kebutuhan fisik atau dasar) hingga ke tingkat yang paling tinggi (kebutuhan aktualisasi diri). Maslow mengatakan dalam Sumarnonugroho (1984: 6) dalam Soetomo (2013: 15) dan Maslow (1970) dalam Calvin S. Hall dan Garder Lindzey (1985: 202) ada beberapa jenis kebutuhan yang tersusun secara hirarkis sebagai berikut:



Sumber: Calvin (1985: 202)

Pertama, kebutuhan fisik atau dasar (*physiological*), merupakan kebutuhan yang paling dasar dan alamiah pada manusia. *Kedua*,

kebutuhan akan penghargaan (*esteem*). Maslow (1970) dalam Calvin (1985: 205) mengatakan bahwa setiap orang memiliki dua kategori kebutuhan akan penghargaan, yakni harga diri dan kebutuhan akan penghargaan dari orang lain. (a) harga diri adalah penilaian terhadap hasil yang dicapai, sejauh mana memenuhi ideal diri. (b) penghargaan dari orang lain, meliputi prestasi, pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, nama baik serta penghargaan.

2. Program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK)

Model Desa Konservasi (MDK) adalah desa yang dijadikan model dalam upaya memberdayakan masyarakat di dalam dan di sekitar Hutan Konservasi, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya serta aspek lainnya, dan akan menjadi contoh dalam pemberdayaan di tempat lain. Tujuan pembangunan LMDK yaitu agar pengelolaan Kawasan Konservasi dapat dilakukan dengan baik sehingga berfungsi secara optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tujuan pembangunan LMDK juga untuk masyarakat di desa penyangga sekitar Kawasan Konservasi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek ekologi atau lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial.

a. Kriteria Model Desa Konservasi (MDK)

Adapun kriteria desa yang dijadikan sebagai Model Desa Konservasi (MDK) adalah: *pertama*, desa yang letaknya di sekitar Kawasan Konservasi dan masyarakat berinteraksi langsung dengan Kawasan Konservasi. *Kedua*, desa yang masyarakatnya mempunyai kepedulian terhadap pelestarian Kawasan Konservasi. *Ketiga*, desa yang kehidupan masyarakatnya mempunyai ketergantungan kuat terhadap keberadaan Kawasan Konservasi. *Keempat*, desa yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan. *Kelima*, desa yang secara umum mempunyai permasalahan yang sama dengan desa-desa lainnya di sekitar Kawasan Konservasi.⁷

b. Indikator Keberhasilan Model Desa Konservasi

Berikut adalah indikator-indikator keberhasilan MDK: (1) adanya pendampingan atau fasilitator bagi masyarakat yang memadai. (2) masyarakat mulai berpartisipasi dalam pembangunan kelembagaan. (3) terjadinya interaksi positif antar kelompok dan antar desa. (4) meningkatnya roda pertanian dan kesejahteraan masyarakat. (5) berkurangnya gangguan terhadap Kawasan Konservasi. (6) meningkatnya peran dan fungsi Kawasan Konservasi. (7) meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. (8) intensitas

⁷www.natasamastha.com. Diakses pada 9 Januari 2016.

berkumpul masyarakat untuk berembung atau berdiskusi cukup tinggi. (9) mulai berfungsinya kelembagaan masyarakat yang ada. (10) meningkatnya kesehatan masyarakat dan menurunnya jumlah orang sakit. (11) mulai terjalinnya hubungan dengan dunia luar untuk kepentingan bisnis.⁸

3. Konsep Evaluasi Program

a. Evaluasi dan Tipe-Tipe Evaluasi

Penelitian tentang evaluasi program LMDK ini menggunakan konsep evaluasi Soetomo (2013: 341), yang mengatakan bahwa evaluasi dilakukan tidak hanya pada saat program telah berhasil, melainkan dapat juga dilakukan pada saat program sedang berjalan. Untuk itu, maka perlu adanya kontrol atau monitoring dari institusi penyelenggara program selama program tersebut berjalan. Bahkan, Mathur dan Inayatullah (1980: 58) dalam Soetomo (2013: 349) merekomendasikan evaluasi dilakukan sejak perumusan desain program. Dalam hal ini, mereka membedakan evaluasi dalam tiga tipe, yaitu evaluasi sebelum program dilaksanakan (*pre-progame evaluation*), evaluasi pada saat program sedang berjalan (*on-going evaluation*), dan evaluasi setelah program selesai dilaksanakan (*ex-post evaluation*).

b. Metode Evaluasi Program

Penelitian tentang evaluasi program LMDK ini menggunakan metode evaluasi program metode eksperimen (*analysis*). Alasannya, penelitian ini melakukan cara menilai keberhasilan program LMDK yang ada di Desa Linggasana tersebut dengan membandingkan kondisi klien atau kelompok sasaran sebelum dan sesudah memperoleh program yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan tersebut. Selain itu, juga bisa dibandingkan antara klien yang tidak menerima program LMDK sebagai kelompok pembanding (*control group*). Dengan demikian, maka akan tampak terlihat apakah upaya kesejahteraan melalui program pemberdayaan LMDK yang ada di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan ini berhasil dilakukan atau tidak.

METODOLOGI

a. Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* di sini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dari pertimbangan tertentu. Misal, orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan (Sugiyono, 2012: 217). Berdasarkan pada kriteria tersebut, sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah masyarakat yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti. pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Desain Penelitian tentang evaluasi program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) ini menggunakan metode deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain melakukan wawancara, metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni dengan cara melihat data-data terkait penelitian, baik itu tentang gambaran umum Desa Linggasana maupun program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) yang telah tercatat melalui dokumen-dokumen yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Dan Implementasi Program LMDK Desa Linggasana

1. Persiapan Program

Berdasarkan tabel tata waktu pelaksanaan program, Balai TNGC telah mempersiapkan beberapa agenda sebagai *guide* dalam pelaksanaan program LMDK di Desa Linggasana. Mulai dari sosialisasi yang dilakukan pada Oktober 2011, perencanaan dan pelaksanaan pada November 2011 serta supervisi dan pelaporan sebagai agenda terakhir program pada bulan Desember. Agenda pertama yang dilakukan oleh Balai TNGC adalah melakukan persiapan program. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Balai TNGC dalam melakukan persiapan program berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan program LMDK Desa Linggasana tahun 2011 adalah sosialisasi, pembentukan Lembaga Desa, menyiapkan fasilitator, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan PRA (*Participatory Rural Appraisal*).

2. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok

Berdasarkan hasil rencana usulan maka ditetapkan Skala Prioritas Usulan Kegiatan yaitu:⁹ *pertama*, pariwisata. *Kedua*, penghijauan. *Ketiga*, pengolahan sampah. *Keempat*, apotek hidup. *Kelima*, industri pengolahan makanan. *Keenam*, budidaya jamur. Hal tersebut berdasarkan Hasil Laporan Kegiatan Program tahun 2011 di Desa Linggasana.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Linggasana tidak mengetahui tentang program LMDK yang dicanangkan oleh Balai TNGC. Mereka hanya diberitahukan bahwa ada pelatihan yang akan dilakukan oleh Balai TNGC di Balai Desa. Setelah itu, masyarakat dikumpulkan dan diberi pelatihan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah. Maka dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat seolah ikut terlibat sebagai subjek

⁸www.natasamastha.com. Diakses pada 9 Januari 2016.

⁹Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program LMDK Desa Linggasana tahun 2011.

program, namun dalam hal ini, masyarakat tetap dijadikan sebagai objek sasaran program pemerintah. Pemerintah seolah menjadikan masyarakat sebagai aktor keseluruhan program, tetapi pada kenyataannya pemerintah telah memainkan strategi-strategi tersendiri dalam perencanaan program LMDK yang ada di Desa Linggasana tersebut. Tanpa masyarakat sadari, mereka hanya dijadikan sebagai objek atau pemain yang perannya telah ditentukan dan dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah.

3. Pelaksanaan Program

Dalam pertemuan yang dilakukan di Balai Desa Linggasana pada akhir tahun 2011, pihak Balai TNGC tidak hanya memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tergabung dalam ketiga kelompok tersebut, melainkan juga memberikan uang sebesar Rp. 120.000.000,- kepada masyarakat sebagai modal awal program kegiatan LMDK.¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kusmiati, dari modal awal sebesar Rp. 120.000.000,- dibagikan ke dalam tiga kelompok yang telah terbentuk, yakni Kelompok Kehutanan, Kelompok Lingkungan, dan Kelompok Pertanian. Masing-masing kelompok mendapatkan bagian uang untuk dijadikan sebagai modal awal kegiatan kelompok mereka sebesar Rp 40.000.000,-.¹¹ Berikut adalah tabel modal awal program LMDK di Desa Linggasana.

Tabel 22
Modal Awal Program LMDK Desa Linggasana

No	Modal Awal (Rp)	Deviasi		
		Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian
1.	120.000.000,-	Rp 40.000.000,-	Rp 40.000.000,-	Rp 40.000.000,-

Sumber: Hasil Wawancara dengan Ibu Kusmiati, 2015

Pertama, Kelompok Lingkungan. Kelompok Lingkungan program LMDK di Desa Linggasana terbentuk pada awal tahun 2012. Kelompok Lingkungan tersebut dipimpin oleh Ibu Winda selaku masyarakat Desa Linggasana yang tergolong sebagai pemuda desa yang ikut dalam pelatihan program LMDK. Tujuan kelompok Lingkungan ini adalah untuk menciptakan lingkungan Desa Linggasana agar tampak lebih bersih, sampah tidak berserakan, dan ada penghijauan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Umar selaku Sekretaris Desa Linggasana, dalam pelaksanaannya, pihak Balai TNGC bersama Pemerintah Desa Linggasana dan masyarakat Kelompok Lingkungan tersebut membuat kantong-kantong sampah. Kantong-kantong sampah tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu

kantong untuk sampah organik dan kantong untuk sampah non-organik. Kantong-kantong sampah tersebut disebar ke tiap-tiap dusun yang ada di Desa Linggasana. Tujuannya adalah agar masyarakat Desa Linggasana dapat membiasakan hidup bersih dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan agar tidak tampak lagi sampah-sampah yang berserakan di lingkungan wilayah Desa Linggasana, sehingga akan tercipta lingkungan Desa Linggasana yang bersih. Selain itu juga membuat tanaman organik. Tanaman organik tersebut ditanam dengan memanfaatkan lahan atau pekarangan kosong di sekitar rumah masyarakat. Seperti tanaman jahe merah, ada juga yang memanfaatkan lahan tersebut dengan menanam tanaman pisang, dan tanaman-tanaman organik lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Menurut Pak Umar, Ibu Winda merupakan salah satu pemuda Desa Linggasana yang mengikuti pelatihan saat itu. Namun setelah menikah, Ibu Winda tidak aktif menjadi ketua Kelompok Lingkungan program LMDK, karena harus ikut dengan suaminya. Ketika Ibu Winda menikah dan tidak aktif menjadi ketua kelompok Lingkungan tersebut, Kelompok Lingkungan program LMDK Desa Linggasana pun menjadi tidak berjalan.

Kedua, Kelompok Kehutanan. Kelompok kedua program LMDK yang ada di Desa Linggasana adalah Kelompok Kehutanan. Kelompok Kehutanan pun terbentuk pada waktu yang sama, yakni awal tahun 2012. Kelompok Kehutanan Desa Linggasana dipimpin oleh Pak Agung. Adapun fokus kegiatan kelompok tersebut adalah pengolahan tempat wisata, seperti bumi perkemahan dan pos pendakian Gunung Ciremai.¹³ Bumi perkemahan tersebut terletak di Sigenteng. Namun, untuk saat ini dikelola oleh desa, bukan oleh Kelompok Kehutanan yang terbentuk ketika pelatihan awal yang dilakukan di Balai Desa. Hal ini dikarenakan anggota kelompok Kehutanan program LMDK tersebut mayoritas pemuda dan telah pergi merantau untuk bekerja. Hal inilah yang menyebabkan kelompok Kehutanan program LMDK Desa Linggasana, saat ini tidak berjalan.¹⁴

Ketiga, Kelompok Pertanian. Kelompok ketiga program LMDK yang ada di Desa Linggasana adalah Kelompok LMDK Pertanian. Kelompok Pertanian ini berfokus pada pengolahan makanan yang diharapkan akan menjadi ciri khas dari Desa Linggasana itu sendiri. Kelompok Pertanian tersebut diberi nama

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Kusmiati sebagai Ketua kelompok home industri program LMDK Desa Linggasana, 18 April 2015.

¹¹ Wawancara dengan Pak Umar selaku Sekretaris Desa Linggasana pada 25 April 2016.

¹² Wawancara dengan Pak Umar selaku Sekretaris Desa Linggasana pada 25 April 2016.

¹³ Wawancara dengan Pak Endin selaku Ekbang Desa Linggasana, 19 April 2016.

¹⁴ Wawancara dengan Pak Umar selaku Sekretaris Desa Linggasana pada 25 April 2016.

kelompok Home industri Lingga Jaya.¹⁵ Kelompok Pertanian LMDK Desa Linggasana dipimpin oleh Ibu Kusmiati. Awalnya, kelompok tersebut terdiri dari perempuan dan laki-laki, namun setelah kegiatan berjalan, Kelompok Pertanian terbagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok Pertanian Perempuan dan kelompok Pertanian Laki-laki.¹⁶ Begitupun dengan kegiatan kelompoknya. Untuk kelompok Perempuan difokuskan untuk mengolah makanan yang berbahan baku berupa hasil pertanian yang ada di Desa Linggasana sedangkan kelompok pertanian yang terdiri dari Laki-laki lebih difokuskan pada pengolahan makanan yang berbahan baku supu atau jamur.¹⁷

Kelompok home industri Lingga Jaya yang beranggotakan perempuan tersebut terletak di salah satu pekarangan rumah anggota. Tempat tersebut mereka sewa dari salah satu anggota kelompok, yaitu Ibu Inin selaku Bendahara kelompok. Untuk biaya penyewaannya itu sendiri, mereka menggunakan sebagian uang modal awal yang diberikan oleh pihak Balai TNGC ketika pelatihan dan sebagiannya lagi ditanggung oleh Ibu Inin.¹⁸ Menurut Ibu Kusmiati, biaya yang dikeluarkan untuk penyewaan tempat produksinya adalah Rp. 2.000.000,- per tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kusmiati, kegiatan home industri dilakukan tidak rutin, melainkan hanya ketika stok makanan yang di toko tersisa sedikit. Modal yang dikeluarkan untuk memproduksi olahan makanan berkisar 2 juta per bulan. Modal tersebut adalah hasil dari produksi penjualan, karena mereka diberi modal oleh pemerintah atau pihak Balai TNGC hanya di awal saja. Sedangkan untuk selanjutnya, mereka harus sebisa mungkin memutar kembali uang yang dikeluarkan, agar kegiatan home industri tetap berjalan. Untuk para anggotanya sendiri, biaya yang dikeluarkan diambil dari keuntungan penjualan. Setiap anggota mendapatkan Rp. 15.000,- per hari. Jadi, uang didapat oleh masing-masing anggota disesuaikan dengan kehadiran mereka dalam memproduksi makanan. Selain itu, pada tahun 2013, hasil produksi tersebut mendapat Nomer Perdagangan dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) Bandung, sehingga olahan keripik yang dibuat oleh para

kelompok home industri tersebut sudah tidak diragukan lagi kehalalannya.¹⁹

B. Perkembangan Program LMDK Desa Linggasana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Umar (Sekretaris Desa Linggasana), perkembangan program LMDK Desa Linggasana “Hidup Segan, Mati Tak Mau”, karena tidak ada keberlanjutan program seperti yang diharapkan oleh pihak-pihak terkait program LMDK tersebut, baik dari masyarakat sebagai penerima program, Pemerintah Desa Linggasana, maupun pihak Balai TNGC sebagai pemberi program LMDK itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor dari intern maupun ekstern.²⁰ Tidak berjalannya kelompok Kehutanan dan kelompok Lingkungan, membuat program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) Desa Linggasana sudah vakum, karena dilihat dari sisi kelembagaan yang sudah tidak berjalan. Terlebih dengan tidak produksinya kelompok home industri Lingga Jaya sejak pertengahan tahun 2015 kemarin.²¹ Menurut Ibu Nisa (pihak Balai TNGC), LMDK yang ada di Desa Linggasana memang sudah tidak berjalan. Dengan ketidakadanya keberlanjutan kelompok Lingkungan dan kelompok Kehutanan, dilihat dari sisi kelembagaan, LMDK Desa Linggasana sudah tidak aktif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan program LMDK tersebut tidak berjalan, di antaranya faktor dari pihak pemerintah, yakni SDM Desa Linggasananya dan Balai TNGC faktor itu sendiri.²² Berikut adalah tabel kesimpulan status program LMDK Desa Linggasana.

Tabel 23
Implementasi Program LMDK Desa Linggasana

No	Kelompok LMDK			Status LMDK	Faktor Penyebab
	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Pertanian		
1	Penataan Bumi Perkemahan	Pengolahan Sampah	Budidaya Jamur	TIDAK AKTIF	✓ SDM ✓ Keterbatasan dana dan bahan baku
2	Pariwisata	Apotek Hidup	Pengolahan Industri Makanan		✓ Mispersepsi ✓ Miskomunikasi

Sumber: Hasil Penelitian

Pertama, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Desa Linggasana. Kenapa faktor SDM menjadi alasan program LMDK Desa Linggasana tidak berjalan? Berdasarkan data wawancara yang dilakukan dengan Pak Umar (Sekretaris Desa

¹⁵Wawancara dengan Ibu Kusmiati sebagai Ketua kelompok home industri program LMDK Desa Linggasana, 18 April 2015.

¹⁶Wawancara dengan Ibu Inin selaku Bendahara kelompok home industri prorgam LMDK, 23 Februari 2016.

¹⁷Wawancara dengan Ibu Kusmiati sebagai Ketua kelompok home industri program LMDK Desa Linggasana, 18 April 2015.

¹⁸Wawancara dengan Ibu Inin selaku Bendahara kelompok home industri prorgam LMDK, 23 Februari 2016.

¹⁹Wawancara dengan Ibu Inin selaku Bendahara kelompok home industri prorgam LMDK, 23 Februari 2016.

²⁰Wawancara dengan Pak Umar selaku Sekretaris Desa Linggasana pada 25 April 2016.

²¹Wawancara dengan Ibu Nisa selaku pihak Balai TNGC, 6 April 2016.

²²Wawancara dengan Pak Umar selaku Sekretaris Desa Linggasana pada 25 April 2016.

Linggasana, 25 April 2016), pada saat pelatihan yang dilakukan oleh pihak Balai TNGC di Balai Desa, masyarakat yang menjadi peserta mayoritas para pemuda Desa Linggasana, ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengikuti pelatihan tersebut hanya beberapa saja. Pihak desa sendiri tidak mengerti bagaimana pemilihan peserta pelatihan tersebut. Pihak pemerintah menganggap bahwa program LMDK tersebut dikhususkan untuk para pemuda Desa Linggasana. Mereka menganggap bahwa pihak Balai TNGC memberikan program LMDK tersebut dengan tujuan untuk memberdayakan pemuda Desa Linggasana agar para pemuda Linggasana tidak ekspansi atau urbanisasi serta ke depannya ada regenerasi dari Desa Linggasana itu sendiri.²³ Namun hal itu tidak seperti apa yang diharapkan, karena banyak pemuda yang merupakan anggota LMDK tersebut pergi merantau ke luar kota untuk mencari pekerjaan. Seperti merantau ke Jakarta.²⁴ Selain pergi merantau, para pemuda perempuan yang menjadi anggota pun banyak yang sudah menikah dengan orang luar Desa Linggasana dan ikut ke rumah suaminya. Banyaknya pemuda yang menjadi anggota keluar, akhirnya proses kegiatan kelompok LMDK pun menjadi terhambat. Terlebih kelompok pertanian LMDK yang beranggotakan perempuan, mengalami kesibukan lainnya, seperti mengurus cucu dan anak kecilnya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Pak Umar berikut ini.²⁵

Sama halnya dengan Kelompok Pertanian, Kelompok Kehutanan dan Kelompok Lingkungan pun memiliki permasalahan yang sama, yakni tidak adanya SDM karena pemuda yang menjadi anggota kelompok harus pergi merantau. Tidak ada anggota dan tidak ada masyarakat lain yang masuk menjadi anggota, akhirnya Kelompok Kehutanan dan Kelompok Lingkungan pun tidak berjalan.²⁶ Pemerintah tidak bisa mencegah para pemuda tersebut untuk tidak merantau, karena mereka memang mempunyai hak untuk menentukan hidup mereka sendiri. Hal inilah yang akhirnya membuat anggota kelompok LMDK menjadi semakin berkurang, seperti yang diungkapkan oleh Pak Umar (Sekretaris Desa Linggasana).

Kedua, faktor keterbatasan dana dan bahan baku. Seperti yang telah diketahui bahwa Kelompok Pertanian LMDK Desa Linggasana terdiri dari dua kelompok, yakni Kelompok Perempuan yang mengolah olahan makanan berbahan baku hasil pertanian yang ada di desa,

dan kelompok lainnya adalah Kelompok Pertanian yang terdiri dari laki-laki yang mengolah olahan makanan berbahan baku supu atau jamur. Kelompok Pertanian yang terdiri dari laki-laki tidak berjalan tidak lama setelah pelatihan dilakukan. Kelompok pembuatan supu atau jamur tersebut hanya bisa bertahan atau berjalan selama sekitar 4 hingga 8 bulanan. Selain karena banyak anggotanya yang pergi merantau, juga disebabkan karena sulitnya mencari bahan baku supu atau jamur. Hal tersebut berdasarkan pemaparan oleh Ibu Kusmiati.²⁷

Selain bahan baku yang terbatas, untuk kelompok home industri yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian, masalah dana juga menjadi faktor tidak berjalannya kegiatan. Mereka mengatakan bahwa saat ini tidak ada dana suntikan dari pihak Balai TNGC untuk kegiatan produksi home industri mereka. Hal ini berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Kusmiati.²⁸

Ketiga, faktor dari pihak pemerintah atau Balai TNGC. Salah satu faktor yang menyebabkan kelembagaan MDK Desa Linggasana tidak berjalan adalah faktor dari pihak pemerintah atau Balai TNGC selaku pemberi program. Berikut di antaranya faktor-faktor yang bersumber dari pihak pemerintah atau Balai TNGC:

1. Tidak adanya pengontrolan yang bersifat berkelanjutan dari pihak Balai TNGC atau pihak pemberi program LMDK.
2. Ketidaksinkronan antara pembuat program dan penerima program.
 - a. Terjadinya mispersepsi dan kesalahpahaman terkait pelaksanaan kegiatan program LMDK tersebut.²⁹
 - b. Adanya miskomunikasi antara pihak-pihak terkait program.

C. Implikasi Program LMDK Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Linggasana

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya, maka untuk mengetahui bagaimana implikasi program LMDK terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Linggasana adalah jika program LMDK tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tersusun dalam hirarki Abraham Maslow, yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial (seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009). Dalam hal ini, yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui implikasi

²³Wawancara dengan Pak Umar selaku Sekretaris Desa Linggasana pada 25 April 2016.

²⁴Wawancara dengan Ibu Kusmiati sebagai Ketua kelompok home industri program LMDK Desa Linggasana, 23 Februari 2016.

²⁵Wawancara dengan Ibu Inin selaku Bendahara kelompok home industri proram LMDK, 23 Februari 2016.

²⁶Wawancara dengan Pak Umar selaku Sekretaris Desa Linggasana pada 25 April 2016.

²⁷Wawancara dengan Ibu Kusmiati sebagai Ketua kelompok home industri program LMDK Desa Linggasana, 23 Februari 2016.

²⁸Wawancara dengan Ibu Kusmiati sebagai Ketua kelompok home industri program LMDK Desa Linggasana, 23 Februari 2016.

²⁹Wawancara dengan Pak Umar selaku Sekretaris Desa Linggasana pada 25 April 2016.

program LMDK terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Linggasana adalah kebutuhan dasar atau fisik (material) dan kebutuhan akan harga diri (spiritual). Adapun pemaparannya adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dasar atau fisik (material)

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab implementasi program LMDK, secara lembaga program LMDK Desa Linggasana sudah tidak berjalan atau vakum. Hal ini disebabkan karena terhentinya kegiatan-kegiatan program yang disebabkan banyaknya anggota yang keluar. Jika dilihat dari kebutuhan dasar atau fisik, program LMDK yang ada di Desa Linggasana memang memberikan pemasukan pendapatan bagi anggota program. Tetapi, hal itu tidak signifikan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan perhitungan modal awal, pengeluaran dan pendapatan anggota kelompok yang tergabung dalam kelompok program LMDK. Namun, perhitungan tersebut hanya dapat dilihat dari kelompok LMDK divisi pertanian, yakni home industri. Hal ini disebabkan karena hanya divisi home industri yang berjalan hingga pertengahan tahun 2015. Berikut adalah tabel analisis kelompok LMDK divisi pertanian, home indutsri.

Tabel 28
Analisis Pengalokasian Dana LMDK Home Industri

Modal Awal (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Pendapatan (Rp)
15.000.000,-	1. Sewa Tempat (2.000.000,- per tahun)	15.000,- per produksi
	2. Peralatan dan Bahan Baku (2.000.000,- per bulan)	

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Ibu Kusmiati, 2015

Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum pada tabel di atas, modal awal yang didapatkan oleh kemlompok home industri program LMDK Linggasana adalah Rp 15.000.000,-. Modal awal tersebut digunakan untuk menyewa tempat (Rp 2.000.000,-) dan membeli peralatan serta bahan baku (Rp 2.000.000,-). Dalam hal ini, modal yang dikeluarkan oleh naggota kelompok home industri adalah Rp 4.000.000,-. Namun, peneliti tidak bisa menemukan rincian secara detail tentang pengalokasian dana tersebut. Hal ini disebabkan karena Ibu Kusmiati (ketua kelompok) dan Ibu Inin (anggota kelompok) hanya memberikan informasi tentang pendanaan yang tidak begitu detail. Kegiatan home industri berlangsung tidak rutin setiap hari, hanya 3 kali dalam seminggu. Setiap kali memproduksi makanan, masing-masing anggota mendapat upah sebesar Rp 15.000,- per orang. Jika jumlah anggota adalah 7 orang, maka kelompok home industri mengeluarkan biaya untuk mengeluarkan uang untuk upah kepada para anggota adalah Rp 105.000,- per sekali produksi. Berikut adalah tabel analisis pendapatan per orang dalam kelompok LMDK home industri.

Tabel 29
Analisis pendapatan anggota LMDK Home Industri

Item		
Pendapatan per produksi (Rp)	Pendapatan Per minggu (Rp)	Pendapatan per bulan (Rp)
15.000,-	45.000,- (3x produksi)	180.000,- (dikalikan 4 minggu)

Sumber: Hasil Wawancara dengan Ibu Kusmiati

Berdasarkan hasil analisis pendapatan di atas, anggota home industri mendapatkan upah Rp 15.000,- per orang. Kagiatan home industri dilakukan 3 kali dalam seminggu. Jika dihitung, total pendapatan yang dihasilkan oleh anggota home industri dalam seminggu adalah Rp 45.000,-. Total tersebut dihasilkan dari upah per produksi dikalikan 3x produksi dalam seminggu (Rp 15.000,- x 3). Jika dalam seminggu, anggota mendapatkan uang Rp 45.000,-, maka pendapatan yang dihasilkan oleh para anggota kelompok LMDK adalah Rp 180.000,- per bulan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis pendapatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kelompok home industri program LMDK tidak bisa membantu untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena upah yang diperoleh para anggota dalam kegiatan home industri tersebut hanya Rp 180.000,-. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator kesejahteraan adalah jika pendapatan yang diperoleh minimal Rp 600.000,- per bulan.

Tabel 30
Analisis Perbandingan Pendapatan

Item	
Pendapatan Anggota LMDK (Rp)	Pendapatan Minimal Menurut BPS (Rp)
180.000,- per bulan	600.000,- per bulan

Sumber: Hasil Penelitian Program LMDK Desa Linggasana

Berdasarkan tabel di atas dan jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh anggota home industri tersebut, masih jauh memenuhi kriteria tersebut. Hal inilah yang menyebabkan bahwa implikasi program LMDK tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anggota kelompok home program LMDK Desa Linggasana. Berikut adalah tabel perbandingan antara pendapatan masyarakat Linggasana yang tergabung dalam kelompok home industri LMDK dan upah minimal menurut BPS.

2. Kebutuhan Akan Penghargaan (Spiritual)

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sebagai implikasi program LMDK di Desa Linggasana adalah dengan terpenuhinya kebutuhan akan penghargaan. Dalam hal ini, program LMDK di Desa Linggasana bisa dinyatakan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat jika masyarakat telah mampu memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan program LMDK tersebut dan masyarakat tidak memiliki ketergantungan terhadap pemerintah, yakni Balai Taman Nasional

Gunung Ciremai (TNGC). Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor yang menyebabkan ketidakaktifan program LMDK di Desa Linggasana adalah adanya kebergantungan masyarakat yang mengikuti program LMDK tersebut terhadap Balai TNGC. Dalam artian, masyarakat tidak lagi melakukan kegiatan program LMDK karena tidak adanya pengontrolan dari pihak Balai TNGC. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Kusmiati. Padahal, kebergantungan masyarakat tersebut bukan menjadi tujuan pemerintah dalam mencanangkan program LMDK. Hal ini disebabkan karena terciptanya kemandirian masyarakat lah yang menjadi salah satu harapan atau tujuan dari adanya program LMDK. Berikut adalah tabel analisis perbandingan antara indikator kesejahteraan yang sebenarnya dan indikator yang ada di masyarakat Desa Linggasana dalam program LMDK.

Tabel 31
Implikasi Program LMDK Desa Linggasana

No	Item	
	Indikator Kesejahteraan	Keadaan Masyarakat
1	Pendapatan minimal Rp 600.000,- per bulan	Pendapatan hanya Rp 180.000,- per bulan
2	Kebutuhan dasar terpenuhi	Pendapatan yang diperoleh hanya dapat menutupi biaya dapur
3	Terciptanya kemandirian	Masyarakat masih ingin diarahkan
4	Tidak tercipta ketergantungan	Adanya ketergantungan terhadap pihak Balai TNGC

Sumber: Hasil Analisis Implikasi Program LMDK Desa Linggasana

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program LMDK yang dicanangkan oleh Balai TNGC tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Linggasana. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dari kegiatan program LMDK tersebut masih jauh di bawah pendapatan minimal yang telah ditentukan oleh BPS, yakni hanya sekitar Rp 180.000,- per bulan sedangkan pendapatan minimal menurut BPS adalah Rp 600.000,- per bulan. Adanya kegiatan program LMDK memang memberikan hal positif untuk masyarakat, karena ada terciptanya kegiatan yang bisa menghasilkan pendapatan. Namun, pendapatan tersebut tidak memenuhi kebutuhan dasar atau fisik seperti indikator kesejahteraan yang telah ditentukan oleh teori Abraham Maslow. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang diperoleh jauh di bawah pendapatan minimal yang telah ditentukan oleh BPS.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas, langkah pemberdayaan yang dilakukan oleh balai TNGC tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Linggasana. Jika disimpulkan, yang dibutuhkan masyarakat Desa Linggasana hanyalah lahan pertanian dan air, yang kini telah dirampas oleh balai TNGC. Bukan pemberdayaan yang berbentuk *life skill* melalui program Lembaga Model Desa Konservasi (LMDK) tersebut. Dalam hal ini, pihak TNGC belum menggunakan metode

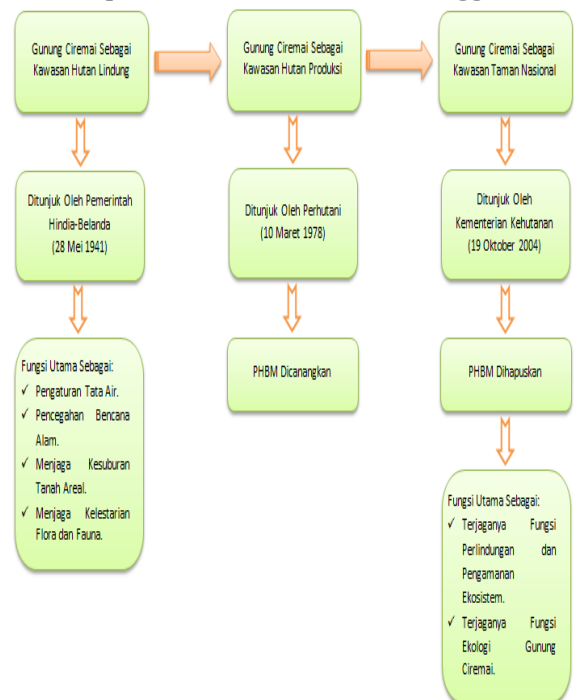
PRA dengan baik, sehingga langkah pemberdayaan yang dicanangkan pun tidak dapat terealisasi dengan baik pula. Hal inilah yang menjadi alasan, mengapa program LMDK yang ada di Desa Linggasana menjadi vakum atau tidak berjalan. Untuk mempermudah mengetahui dan menganalisis bahwa program LMDK tersebut tidak menjawab atau sesuai kebutuhan masyarakat Desa Linggasana, maka dapat dilihat dari pohon masalah Desa Linggasana dan pohon masalah program LMDK Desa Linggasana yang terdapat di bab sebelumnya.

Alur PHBM di Desa Linggasana



Sumber: Hasil Penelitian Program LMDK Desa Linggasana

Alur Implementasi TNGC di Desa Linggasana



Sumber: Hasil Penelitian di Desa Linggasana

Alur Program di LMDK Desa Linggasana



Sumber: Hasil Penelitian tentang Program LMDK di Desa Linggasana

DAFTAR PUSTAKA

Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Program LMDK*. Kuningan, 2011.

Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Program LMDK*. Kuningan, 2013.

Calvin S. Hall dan Garder Lindzey. *Introduction To Theories Of Personality*. Canada: Public Art Collections/Art Resource. 1985.

Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, *Kebijakan dan Strategi Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial*. Kementerian Sosial R.I. Jakarta. 2011.

Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2014.

Faizi, Fuad. *Aset Pertanian Lereng Ciremai Dalam Cengkeraman Tengkulak Dan Ancaman Krisis Air*. Cirebon: Nurjati Press. 2015.

Indriyanto. *Pengantar Budi Daya Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

Mohammad Ali dan Mohammad Asrori. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2010.

Nasikun. *Urbanisasi dan Kemiskinan Di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1996.

Nazir Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2014.

Soetomo. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Umar. *Profil Desa Linggasana Kecamatan Cilimus*. Kuningan., 2015.

Budi Yanto Eko Wahyu, *Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Konservasi Hutan: Kasus Konservasi Hutan Di Sekitar Desa Nglebut, Randublatung, Blora*.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>.
Diakses pada 15 November 2015.

Jurnal nama tidak ditemukan, *Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Model Desa Konservasi Di Desa Tamanjaya: Kasus di Balai Taman Nasional Ujung Kulon, desa Tamanjaya*.

[www.ujungkulon.org>Home>Berita](http://www.ujungkulon.org/Home/Berita). Diakses pada 15 November 2015.

Ristianasari, Pudji Muljono dan Darwis S. Gani, *Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi Terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung*, jurnal yang disetujui 31 Mei 2013. Bogor: Pusat Penyuluhan Kehutanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Kehutanan, 2013. <http://ejournal.fordamof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/175>.
Diakses pada 15 november 2015.